

ABSTRAK

Penataan dan pengendalian pada pedagang kaki lima di Sidoarjo dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi yang tertib dan teratur dalam kegiatan usaha berdagang dengan tujuan akhir untuk tercapainya sebuah kualitas ekonomi kerakyatan yang mumpuni sehingga dapat membantu menaikkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan kosep, serta pendekatan kasus. Dengan diterapkannya aturan-aturan oleh Pemerintah Daerah yang mendapat delegasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur otonominya sendiri dapat menghasilkan sebuah iklim usaha dalam masyarakat menjadi lebih baik dan teratur. Tindakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengedepankan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) untuk menjamin keselarasan pada sebuah sistem kegiatan usaha (berdagang) yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) agar dapat berjalan dengan tertib dan mengantisipasi adanya segala bentuk praktik-praktik pelanggaran, seperti melakukan sebuah usaha di lahan yang tidak sesuai peruntukannya, pencemaran lingkungan akibat limbah usaha, serta menyebabkan gangguan pada pengguna fasilitas umum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk membenahi ketertiban para pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih tertata dan tertib. Penegakan hukum ini dilakukan dengan persuasif dan represif, yang mana penegakan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara persuasif yang melakukan pengawasan terhadap pedagang yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila pedagang yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pelanggaran dari peraturan yang terdapat pada peraturan daerah.

Kata kunci: Pengendalian, Pedagang Kaki Lima, Penegakan hukum, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

ABSTRACT

The arrangement and control of street vendors in Sidoarjo was done to create a neat and order condition on their economics activity, so that the qualified quality of people's economy could be reach, therefore the regional income could increase. This research uses juridis normative type with laws and regulations approach, theory approach, and case approach. The application of regional regulations which already legalized by the central government to control their own region could also create a better business condition. Street vendors arrangement act by the regional government was done by prioritazing the principle of good government to ensure a good harmony in the street vendor's business activities and to anticipate any delinquency, such as, doing a business in an unappropriate land, create an environment pollution due to their waste, and create a disturbance to other public facility's users. The law enforcement by the regional government was taken to improve the street vendors' orderliness. This law enforcement act was done persuasively and repressively, which was done persuasively by observing their business activity, on the other hand was also done repressively if any of the street vendors violate the regional laws and regulations.

Key words: *Media Control, Street Vendors, Law Enforcement, People's Economic Empowerment*